



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALI IMRON**
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN**
3. NHK : **427928**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.340.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/136 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/136 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 800 m2 di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 40.000.000
9. Tanah Seluas 1500 m2 di LABUHANBATU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
10. Tanah Seluas 895 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 451.000.000



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
5. MOBIL, INNOVA 2,4 V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
420.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.255.449
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.882.255.449
III. HUTANG	Rp.	558.469.031
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.323.786.418

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.